

## **STRATEGI PERANG JARAK JAUH AMERIKA SERIKAT DI TANDUK AFRIKA**

**Didiet Trilaksono**<sup>1</sup>

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

The implementation of the United States' (US) long-range war strategy in the Horn of Africa region as a response to threats and modern counterterrorism efforts also faces various challenges of complex security dynamics, especially those related to transnational terrorism, armed conflict, and political instability involving various local, regional, and international actors. The purpose of this study is to analyze the indirect US military intervention in the battlefield through the implementation of a long-range war strategy, through aspects such as policies, mechanisms, effectiveness, and to evaluate its effectiveness in counterterrorism operations carried out. The research method used is a qualitative approach with library research data collection techniques and descriptive-analytical analysis, by analyzing relevant academic literature. The research findings indicate that a combination of strategies, including local security cooperation, intelligence assistance, training, special operations, military operations, the use of advanced technology and private military security contractors, local security agencies, and long-range air operations, has proven effective in enhancing regional threat mitigation and stability, countering terrorism, strengthening and expanding US political and military positions and influence, securing access to bases and resources in the region, strengthening regional defense capacity, and assisting in building long-term political and military relationships with partner nations. However, the implementation of this combination requires ongoing adjustments to remain relevant. Therefore, it can be concluded that the long-range war strategy through security cooperation is a crucial tool in US counterterrorism in the Horn of Africa and has proven effective in addressing complex security challenges without requiring a direct military presence.

**Keywords:** Horn of Africa, Security Cooperation, Counterterrorism, Long-Range Warfa

### **ABSTRAK**

Penerapan strategi perang jarak jauh Amerika Serikat (AS) di kawasan Tanduk Afrika sebagai respon terhadap ancaman dan upaya kontraterorisme modern juga menghadapi berbagai tantangan dinamika keamanan yang kompleks, terutama yang terkait dengan terorisme transnasional, konflik bersenjata, dan ketidakstabilan politik yang melibatkan berbagai aktor lokal, regional, dan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis intervensi militer AS secara tidak langsung di medan perang melalui penerapan strategi perang jarak jauh, melalui aspek-aspek seperti kebijakan, mekanisme, efektivitas, dan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam operasi kontraterorisme yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian perpustakaan dan analisis deskriptif-analitis, dengan menganalisis literatur akademik yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi strategi, termasuk kerja sama keamanan lokal, bantuan intelijen, pelatihan, operasi khusus, operasi militer, penggunaan teknologi canggih dan kontraktor keamanan militer swasta, badan keamanan lokal, dan operasi udara jarak jauh, telah terbukti efektif dalam meningkatkan mitigasi dan stabilitas ancaman regional, melawan terorisme, memperkuat dan memperluas posisi dan pengaruh politik dan militer AS. mengamankan akses ke pangkalan dan sumber daya di kawasan ini, memperkuat kapasitas pertahanan regional, dan membantu membangun hubungan politik dan militer jangka panjang dengan negara-negara mitra. Namun, penerapan kombinasi ini membutuhkan penyesuaian berkelanjutan agar tetap relevan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi perang jarak jauh melalui kerja sama keamanan merupakan alat penting dalam kontraterorisme AS di Tanduk Afrika dan telah terbukti efektif dalam mengatasi tantangan keamanan yang kompleks tanpa memerlukan kehadiran militer langsung.

**Kata kunci:** Tanduk Afrika, Kerja Sama Keamanan, Kontraterorisme, Peperangan Jarak Jauh

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Berbicara pada tahun 2007, Menteri Pertahanan AS Robert Gates berpendapat bahwa 'komponen militer terpenting dalam Perang Melawan Teror bukanlah pertempuran yang kita lakukan sendiri, tetapi seberapa baik kita memungkinkan dan memberdayakan mitra kita untuk membela dan memerintah diri mereka sendiri' (Gates 2007). Konsisten dengan klaim ini, pemerintahan Bush, Obama dan Trump semuanya telah terlibat dalam berbagai upaya untuk membangun kapasitas pasukan keamanan asing untuk mengatasi ancaman terkait keamanan. Hal ini mengharuskan Departemen Pertahanan (DOD) untuk mengembangkan spektrum luas kegiatan militer bilateral dan multilateral di bawah tajuk kerja sama keamanan. Kegiatan-kegiatan ini, yang mana bantuan pasukan keamanan yang lebih banyak diperdebatkan merupakan bagiannya (Staff 2017) telah menjadi komponen penting dari kebijakan luar negeri dan kontraterorisme AS kontemporer (Stephen Biddle 2017). Kerjasama keamanan juga merupakan bagian integral dari perdebatan tentang peperangan jarak jauh (Knowles 2025).

Kerjasama keamanan didefinisikan oleh Pentagon sebagai semua [...] interaksi, program, dan kegiatan dengan pasukan keamanan asing (FSF) dan lembaga mereka untuk membangun hubungan yang membantu memajukan kepentingan AS; memungkinkan negara mitra (PN) untuk menyediakan akses AS ke wilayah, infrastruktur, informasi, dan sumber daya; dan/atau untuk membangun dan menerapkan kapasitas dan kemampuan mereka yang konsisten dengan tujuan pertahanan AS. (J. C. Staff 2017)

Tesis ini memperkenalkan kerja sama keamanan sebagai alat perang jarak jauh, baik dalam pengertian umum maupun dalam kasus khusus operasi kontraterorisme AS di Tanduk Afrika. Saya berpendapat bahwa ada logika keamanan/strategis ganda dalam penggunaannya: ia berfungsi untuk membangun kapasitas pasukan keamanan asing untuk mencegah organisasi teroris mendapatkan tempat berlindung yang aman di dalam perbatasan atau wilayah mereka sendiri; dan untuk membantu mengamankan akses Amerika ke pangkalan, wilayah udara, dan personel keamanan asing, 'mempererat' kemitraan politik dengan pemerintah luar negeri, dan untuk menciptakan pola kerja sama, dan pengaruh. (Doug Stokes & Kit Waterman 2020).

Gagasan bahwa kerja sama keamanan bersifat 'politik' bukanlah hal baru. Gagasan ini mendukung sebagian besar literatur berorientasi praktisi tentang batasan upaya peningkatan kapasitas mitra Barat. (J. M. Stephen Biddle 2017). Namun, fokus yang lebih besar pada politik yang menggerakkan penggunaan aktivitas kerja sama keamanan daripada politik agen yang menerima bantuan ini, memberikan kalkulus alternatif untuk meninjau kembali perdebatan tentang efektivitasnya. Sebagian besar dialog akademis-praktisi yang ada mengenai aktivitas kerja sama keamanan AS di Tanduk Afrika berfokus pada kegagalan membangun kapasitas agen keamanan Somalia dan regional (Reno 2018). Ketika dimensi politik bantuan militer AS dibahas, biasanya dalam konteks bagaimana ketidakselarasan kepentingan politik AS dan penerima telah merusak kemanjuran upaya membangun mitra. Saya berpendapat bahwa ini bermasalah karena kepekaan yang lebih besar terhadap logika keamanan dan strategis kerja sama keamanan berpotensi membantu kita lebih memahami teka-teki yang tampak tentang mengapa aktivitas ini terus berlanjut meskipun kegagalan militernya telah terdokumentasi dengan baik.

Untuk lebih jelasnya, saya tidak berpendapat bahwa hanya logika strategis kerja sama keamanan yang menjelaskan penggunaannya, saya juga tidak berpendapat bahwa berbagai bentuk akses yang dihasilkan oleh penggunaannya mengimbangi kegagalan untuk membangun kapasitas mitra. Selain itu, saya peka terhadap tantangan metodologis dalam mendokumentasikan hubungan antara kerja sama keamanan dan mengamankan berbagai bentuk akses yang dibahas di atas, menyadari bahwa tidak selalu ada 'jalur transmisi' yang jelas di antara keduanya. Meskipun demikian, seperti yang saya dokumentasikan melalui keterlibatan dengan berbagai materi sumber utama, referensi ke penggunaan bantuan militer era Perang Dingin, dan studi empiris operasi

kontraterorisme AS kontemporer di Tanduk Afrika, penggunaan kerja sama keamanan sebagai alat perang jarak jauh dapat dipahami telah mendukung pengejaran tujuan strategis yang lebih luas.

Penelitian saya dalam Bab-Bab selanjutnya tesis ini berlangsung dalam tiga tahap. Bab II memfokuskan pada kerangka teori yang digunakan untuk menunjang kasus penelitian tesis ini. Bab III mengupas penggunaan metodologi penelitian tesis ini. Kemudian Bab IV yang menjadi bahasan dan analisis penelitian tesis ini akan menguraikan tren utama dalam bantuan militer pascaperang dengan fokus khusus pada masa kepresidenan Bush, Obama, dan Trump. Bab ini juga mengungkap logika keamanan dan strategis kerja sama keamanan sebagai instrumen perang jarak jauh. Kerangka kerja ini digunakan di bagian akhir Bab ini untuk mengkaji peran kerja sama keamanan dalam operasi kontraterorisme AS di Tanduk Afrika. Somalia, studi kasus utama saya, telah menjadi pusat kegiatan kerja sama keamanan Amerika di Afrika selama dekade terakhir. Hal ini juga merupakan lambang dukungan AS terhadap 'militer telur Fabergé' yang 'mahal, mengilap, dan mudah pecah (Matissek 2018). Meskipun penggunaannya lebih besar di Somalia daripada dalam operasi militer di tempat lain di Afrika, kasus ini diakui mewakili permintaan yang lebih luas untuk, dan penggunaan, kerja sama keamanan di negara-negara rapuh (Reno 2018)

Bantuan militer, yang salah satu komponennya adalah kerja sama keamanan, telah lama menjadi alat utama kebijakan luar negeri Amerika (White 2014). AS diperkirakan telah memberikan bantuan militer kepada lebih dari 100 negara setelah tahun 1945 (Kuzmarov 2024). Selama Perang Dingin, sekitar \$390 miliar dihabiskan untuk bantuan militer dan pembangunan (Matissek 2018). Bantuan ini memiliki berbagai tujuan strategis. Selain membantu mitra mempertahankan diri dari ekspansi komunis, bantuan ini merupakan jalur utama yang digunakan AS untuk menstabilkan akses ke pasar luar negeri (Gabriel Kolko 1988) dan membantu mengamankan akses ke pangkalan di luar negeri..

Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Robert McNamara kepada Kongres selama tahun 1960-an, AS memberikan bantuan militer karena 'perwira militer adalah calon pemimpin negara mereka. Sangatlah mahal bagi Amerika Serikat untuk berteman dengan orang-orang seperti itu (Gabriel Kolko 1988). Bantuan militer, tegasnya, menghasilkan 'produk sampingan ekonomi yang penting bagi kebijakan luar negeri kita sehubungan dengan stabilitas dan kemajuan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang dan sedang berkembang' dan membantu mengamankan 'akses ke pangkalan dan instalasi di luar negeri' (Gabriel Kolko 1988). Ketiga dinamika ini tampak jelas di Tanduk Afrika. Sebelum kudeta komunis yang menggulingkan Kaisar Haile Selassie pada tahun 1974, Ethiopia telah menerima bantuan militer senilai \$286 juta setelah Perang Dunia Kedua (Kuzmarov 2024). Setelah itu, ketika pola dukungan material ditata ulang untuk mencerminkan lanskap politik baru di kawasan itu, aliran bantuan militer dialihkan ke negara tetangga Somalia (Oberdorfer 2025). Seperti yang dilaporkan Washington Post dengan jujur pada saat itu, AS setuju untuk 'menyediakan \$40 juta dalam bentuk senjata sebagai imbalan atas penggunaan pangkalan udara dan pelabuhan Somalia' (Kissinger 1981).

Praktik semacam itu berlanjut setelah Perang Dingin. Bantuan militer telah menjadi bagian integral dari upaya pasca-9/11 untuk menolak organisasi teroris transnasional tempat berlindung yang aman di negara-negara rapuh (Watts 2017). Miliaran dolar dihabiskan oleh AS dan mitra koalisinya untuk melatih, memperlengkapi, dan menasihati puluhan ribu tentara Afghanistan dan Irak sebagai bagian dari kampanye kontrapemberontakan di kedua negara. Sementara kegiatan ini berskala lebih kecil, bantuan militer juga menjadi pusat dari apa yang Maria Ryan sebut sebagai 'Perang Melawan Teror di pinggiran' (Ryan 2019). Kunci untuk operasi kontraterorisme di Afrika adalah perubahan yang ditetapkan dalam Tinjauan Pertahanan Kuadriliun 2006, sebuah dokumen perencanaan pertahanan yang sangat berpengaruh yang menyaring pendekatan Pentagon yang

terus berkembang terhadap peperangan tidak teratur (Ryan 2019). Dokumen ini menguraikan sejumlah penyesuaian penting terhadap strategi pertahanan AS, termasuk peralihan dari intervensi militer berskala besar ke arah memerangi ‘berbagai operasi asimetris dan tidak teratur (DOD 2006).

Hal ini memerlukan kehadiran jangka panjang yang tidak terlalu terlihat di banyak wilayah di dunia tempat pasukan [AS] secara tradisional tidak beroperasi. Membangun dan memanfaatkan kapasitas mitra juga akan menjadi bagian yang sangat penting dari pendekatan ini, dan penggunaan pengganti akan menjadi metode yang diperlukan untuk mencapai banyak tujuan. Bekerja secara tidak langsung dengan dan melalui pihak lain, dan dengan demikian menolak dukungan rakyat terhadap musuh, akan membantu mengubah karakter konflik (DOD 2006).

Komitmen ini tetap menjadi komponen inti dari kebijakan kontraterorisme Obama. Tinjauan Strategis Pertahanan 2012, misalnya, menempatkan pelatihan, perlengkapan, dan konsultasi pasukan keamanan asing di pusat perang yang sedang berlangsung melawan al-Qaeda. ‘Seiring dengan penarikan pasukan AS di Afghanistan’, dokumen tersebut merinci, ‘upaya kontraterorisme global akan didistribusikan lebih luas dan akan dicirikan oleh campuran aksi langsung dan bantuan pasukan keamanan’ (DOD, Sustaining Global Leadership: Priorities For 21st Century Defence 2012). Berbicara tentang logika keamanan/strategis kembar dari kerja sama Keamanan, Arahan Kebijakan Presiden yang berpengaruh dari pemerintahan Obama tentang Bantuan Sektor Keamanan mencatat bagaimana kegiatan terkait kerja sama keamanan dirancang untuk mencapai lebih dari sekadar memperkuat kapasitas keamanan dan tata kelola mitra. Mereka juga bekerja untuk ‘mempromosikan dukungan mitra untuk kepentingan AS’ termasuk ‘akses militer ke wilayah udara dan hak pangkalan; peningkatan interoperabilitas dan peluang pelatihan; dan kerja sama dalam penegakan hukum, kontraterorisme, antinarkotika’, di antara bidang kebijakan lainnya (The White House 2013).

Meskipun ada pencabutan beberapa pembatasan era Obama terhadap penggunaan kekuatan, pemerintahan Trump telah mempertahankan kerja sama keamanan sebagai alat kontraterorisme utama (Watts 2017). Strategi Nasional Kontraterorisme 2018 menegaskan kembali pentingnya ‘meningkatkan kemampuan mitra asing utama untuk melakukan kegiatan kontraterorisme kritis’ (The White House 2013) yang tetap menjadi komponen penting bagi respons militer terhadap organisasi teroris transnasional. Melembagakan proses yang dapat ditelusuri ke ‘poros ke Asia’ Obama, pemerintahan Trump telah mengkalibrasi ulang arah strategis keseluruhan kebijakan pertahanan AS. Menurut Strategi Keamanan Nasional 2017, Tiongkok dan Rusia ‘secara aktif bersaing melawan Amerika Serikat dan sekutu serta mitra kami (The White House 2013)

Kemunculan kembali persaingan kekuatan besar sebagai lensa pengorganisasian kebijakan luar negeri Amerika menciptakan ketidakpastian baru, termasuk untuk lintasan peperangan jarak jauh. Menurut Stephen Tankel (Tankel 2025). dengan pemerintahan Trump yang ‘lebih berfokus pada konflik kekuatan besar dan rezim jahat, kerja sama keamanan dengan, dan bantuan kepada, sekutu dan mitra akan tetap penting untuk mencapai tujuan pertahanan global. Memang, baik Strategi Keamanan Nasional 2017 maupun Strategi Pertahanan Nasional 2018 menekankan pentingnya kegiatan tersebut dalam menangani tantangan keamanan transnasional di Afrika sambil menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga memiliki nilai dalam ‘membatasi pengaruh jahat kekuatan non-Afrika’ di kawasan tersebut (The White House 2013).

Namun, pengganti Trump, Joe Biden mengambil sikap berbeda. Biden rupanya tidak terlalu tertarik dengan strategi perang jarak jauh. Ketika terpilih menjadi presiden Biden membuat pilihannya: pasukan akan kembali. Ada beberapa faktor yang berperan. Pertama, ada argumen

bahwa pasukan AS tidak pernah benar-benar pergi tetapi keluar masuk negara itu, sikap setengah-setengah-keluar yang pada tingkat tertentu menentang akal sehat. Kedua, Jenderal yang bertanggung jawab, Stephen Townsend, melancarkan kampanye advokasi yang gencar dengan menyatakan bahwa Al-Shabaab merupakan ancaman bagi kepentingan AS di luar negeri dan bahkan Amerika Serikat sendiri – membujuk Departemen Pertahanan untuk mengadvokasi pengiriman kembali pasukan. Ketiga, staf Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional berpihak pada Pentagon, percaya bahwa keterlibatan AS masih menawarkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi kepentingan AS di Somalia dan wilayah sekitarnya (Crisisgroup.org 2023).

Namun, yang paling penting adalah tidak ada yang benar-benar menentang posisi Departemen Pertahanan. Sementara tim Biden mengambil keputusan strategis utama (dengan beberapa biaya politik) untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, yang pernah menjadi garis depan utama perang melawan teror, mereka tidak membuat komitmen besar-besaran untuk mengakhiri semua konflik pasca-9/11, setidaknya tidak segera. Di tempat-tempat yang menurut mereka pasukan AS akan melayani kepentingan dengan biaya rendah dan risiko rendah, Biden dan timnya puas membiarkan operasi terus berlanjut. Somalia muncul sebagai salah satu tempat tersebut (Crisisgroup.org 2023)

Mengingat kebijakan Biden berbeda dengan para pendahulunya, maka penelitian tesis ini hanya difokuskan pada era pemerintahan George W. Bush, Barack Obama, dan Donald Trump mengenai kebijakan perang jarak jauh yang mengandalkan pada kerjasama keamanan dengan kekuatan mitra Amerika. Dengan demikian, kerja sama keamanan untuk malancarkan perang jarak jauh kemungkinan akan tetap menjadi instrumen penting dalam perangkat kebijakan luar negeri dan kontraterorisme Amerika di tanduk Afrika.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Kerja Sama Keamanan**

Istilah kerja sama keamanan telah menjadi populer sejak berakhirnya Perang Dingin. Meskipun belum memiliki definisi yang diterima secara umum, istilah ini telah digunakan secara luas untuk mengabarkan pendekatan baru terhadap hubungan internasional. Istilah ini tampaknya menawarkan jalan keluar dari strategi "zero-sum" Perang Dingin yang sempit menuju cakrawala luas perdamaian dan harmoni internasional yang cerah. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, berbagai peristiwa telah menunjukkan bahwa ledakan optimisme awal ini, paling tidak, prematur.

Dalam kaitan itu, kerja sama keamanan rupanya mencakup pengaturan keamanan internasional tradisional Keamanan Kolektif dan Pertahanan Kolektif serta menambahkan dua elemen baru, Keamanan Individu dan Mendorong, serta Memproyeksikan Stabilitas.

Konsep kerja sama keamanan bukanlah penemuan di era pasca-Perang Dingin. Immanuel Kant memperkenalkan gagasan tersebut pada akhir abad ke-18 (1795) dalam "Artikel Definitif Kedua tentang Perdamaian Abadi." Kant menyatakan bahwa "Hukum bangsa-bangsa harus didasarkan pada federasi negara-negara bebas." (Kant 1996). Saat ini, di awal abad ke-21, istilah kerja sama keamanan telah menjadi jauh lebih populer karena para ahli strategi dan pembuat kebijakan berjuang untuk mbingkai pendekatan baru terhadap keamanan untuk masa kini yang penuh gejolak dan masa depan yang tidak dapat diprediksi.

Pada awal 1990-an, banyak pemikir strategis terperangkap dalam gelombang optimisme yang umumnya dipuji sebagai Tatanan Dunia Baru. Istilah kerja sama keamanan menjadi slogan untuk pendekatan yang agak idealis terhadap iklim internasional yang berubah dengan cepat. Pada

tahun 1992, tiga ahli strategi terkemuka Amerika — Ashton Carter, William Perry, dan John Steinbruner — berbicara tentang kerja sama keamanan dalam hal menyediakan jalan baru menuju perdamaian dunia: “Prinsip-prinsip pengorganisasian seperti pencegahan, stabilitas nuklir, dan penahanan mewujudkan aspirasi perang dingin . . . kerja sama keamanan adalah prinsip yang sesuai untuk keamanan internasional di era pasca-perang dingin.” (Ashton B. Carter 1993).

Pada tahun 1994, menulis dalam *Foreign Policy*, mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans menggambarkan kerja sama keamanan sebagai cenderung “. . . untuk menyiratkan konsultasi daripada konfrontasi, kepastian daripada pencegahan, transparansi daripada kerahasiaan, pencegahan daripada koreksi, dan saling ketergantungan daripada unilateralisme (Evans 1994).

Upaya-upaya untuk mendefinisikan dan membentuk konsep kerja sama keamanan ini pada umumnya mencerminkan pandangan liberal/idealistis tentang masa depan keamanan dunia. Sayangnya, visi ini telah diguncang secara tiba-tiba oleh "kembalinya sejarah" yang tidak diinginkan di Balkan, di beberapa bagian bekas Uni Soviet, dan di tempat lain di Afrika.

Karenanya, pendekatan yang lebih pragmatis terhadap kerja sama keamanan diperlukan jika konsep tersebut ingin benar-benar bermanfaat di dunia yang tidak stabil dan berbahaya. Dengan kata lain, kita harus mencari cara untuk "mengoperasionalkan" istilah tersebut. Untuk mencapainya, kita harus mempersempit harapan kita tentang apa yang dapat dicapai oleh kerja sama keamanan. Kita perlu membangun sistem yang didasarkan pada mekanisme dan lembaga yang sudah ada, yaitu lembaga yang telah terbukti efektif dalam memberikan kedamaian, stabilitas, dan kemakmuran relatif bagi negara dan kelompok negara pada paruh terakhir abad ke-20.

Namun, definisi itu masih bersifat idealistik. Pemerintahan AS dan sekutunya di Barat menerjemahkan kerja sama keamanan bersifat realistik. Pentagon mendefinisikan kerja sama keamanan sebagai semua [...] interaksi, program, dan kegiatan dengan pasukan keamanan asing (FSF) dan lembaga mereka untuk membangun hubungan yang membantu memajukan kepentingan AS; memungkinkan negara mitra (PN) untuk menyediakan akses AS ke wilayah, infrastruktur, informasi, dan sumber daya; dan/atau untuk membangun dan menerapkan kapasitas dan kemampuan mereka yang konsisten dengan tujuan pertahanan AS (irp.fas.org 2017)

Di sini kerja sama keamanan digunakan sebagai perangkat perang jarak jauh, baik dalam pengertian umum maupun dalam kasus khusus operasi kontraterorisme AS di Tanduk Afrika. Ia berfungsi untuk membangun kapasitas pasukan keamanan asing untuk mencegah organisasi teroris mendapatkan tempat berlindung yang aman di dalam perbatasan atau wilayah mereka sendiri; dan untuk membantu mengamankan akses Amerika ke pangkalan, wilayah udara, dan personel keamanan asing, ‘mempererat’ kemitraan politik dengan pemerintah luar negeri, dan untuk menciptakan pola kerja sama, dan pengaruh. Untuk itu, menjelaskan konsep perang jarak jauh menjadi sangat penting untuk menunjang penelitian tesis ini.

### **Perang Jarak Jauh**

Pada abad ke-21, peperangan jarak jauh telah menjadi bentuk keterlibatan militer yang paling umum digunakan oleh negara-negara. Namun, hal itu masih merupakan konsep yang kurang dipahami. Bagi sebagian orang, hal itu bahkan mungkin merupakan istilah yang asing. Di sini saya uraikan pengantar konseptual yang kritis tentang peperangan jarak jauh.

Seperti yang tersirat dari namanya, peperangan jarak jauh mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh negara untuk melawan ancaman dari jarak jauh. Daripada mengerahkan sejumlah besar pasukan mereka sendiri, negara-negara menggunakan berbagai taktik untuk mendukung mitra lokal yang melakukan sebagian besar pertempuran garis depan. Dalam pengertian ini,

'keterpencilan' berasal dari militer suatu negara yang selangkah lebih jauh dari pertempuran garis depan (Watson 2018).

Yang penting, peperangan jarak jauh tidak dilakukan hanya melalui sistem senjata jarak jauh, yang terkadang dijuluki 'perang kendali jarak jauh' (Gusterson 2016). Teknologi jarak jauh berperan, tetapi peperangan jarak jauh mencakup serangkaian tindakan yang lebih luas. Pada akhirnya, aktivitas yang membentuk peperangan jarak jauh dilakukan untuk melawan musuh, yang sering kali berbentuk kelompok bersenjata non-negara (Watson 2018).

Perang jarak jauh biasanya melibatkan negara yang menggunakan dan menggabungkan langkah-langkah berikut: Mendukung pasukan keamanan lokal, baik pasukan resmi negara, milisi, atau paramiliter; misalnya, melalui penyediaan pelatihan, peralatan, atau keduanya; Pasukan operasi khusus, baik yang sedang berlatih atau terkadang bahkan bekerja sama dengan pasukan lokal dan nasional; Kontraktor militer dan keamanan swasta yang menjalankan berbagai peran; Serangan udara dan dukungan udara, termasuk kendaraan udara tak berawak (UAV) atau 'drone bersenjata' dan pesawat berawak; Berbagi intelijen dengan mitra negara dan non-negara yang terlibat dalam pertempuran garis depan.

Ada beberapa contoh di mana negara-negara menghindari dari pengerahan sejumlah besar 'pasukan di lapangan' dan memilih pendekatan jarak jauh. Intervensi yang dipimpin NATO tahun 2011 di Libya adalah contoh kasus yang menggambarkan hal ini. Dengan keinginan untuk menghindari konsekuensi mahal dari pendudukan yang terlihat di Irak dan Afghanistan, pemerintahan Obama dan sekutu internasionalnya mendukung Libya untuk melakukan sebagian besar pertempuran melawan Muammar Gaddafi. Menghadapi apa yang, pada saat itu, tampaknya menjadi krisis kemanusiaan yang menjulang, Resolusi PBB 1973 disahkan dan menyerukan perlindungan warga sipil terhadap ancaman oleh rezim Gaddafi. Awalnya, ini terbatas pada beberapa serangan udara (Mueller 2015). Tetapi bergeser ke sejumlah kecil pasukan yang dikerahkan di darat (Chesterman 2011). Meskipun tujuan awalnya adalah melindungi warga sipil, intervensi tersebut difokuskan pada pergantian rezim. Pasukan khusus Prancis, Inggris, dan Qatar dikirim untuk membantu dan melatih pemberontak Libya dan aset intelijen digunakan untuk mendukung pemberontak saat mereka maju ((Karl P. Mueller (2015). Secara keseluruhan, penggunaan perang jarak jauh sangat penting dalam menggulingkan Gaddafi Namun, seperti yang dibahas kemudian, Libya adalah contoh nyata dari beberapa masalah serius perang jarak jauh.

Contoh menonjol lain dari peperangan jarak jauh dalam praktiknya adalah dukungan koalisi pimpinan AS kepada pasukan lokal di Irak dan Suriah untuk melawan Negara Islam (umumnya dikenal sebagai ISIS) di Irak dan Suriah. Di Suriah, AS melatih dan melengkapi unit-unit Tentara Pembebasan Suriah dan Harakat al-Hazm. Di Irak utara, Pasukan Khusus AS dan lainnya melatih dan mendukung para pejuang Peshmerga. Serangan udara dilakukan secara besar-besaran selama kampanye ini untuk mendukung upaya di darat (Group 2016). Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan biaya finansial dan manusia yang minimal bagi militer Barat yang terlibat dan, sebagian besar, berhasil memukul mundur ISIS (Krieg 2016). Namun, kurangnya perencanaan jangka panjang untuk fase konflik pasca-ISIS telah menimbulkan konsekuensi yang serius dan bertahan lama.

Aktivitas yang membentuk peperangan jarak jauh sering kali, tetapi tidak selalu, dilakukan secara rahasia. Meskipun dapat menarik perhatian media, keterlibatan dalam peperangan jarak jauh sebagian besar dijauhkan dari mata publik. Konflik-konflik ini sering kali menjadi bagian dari 'zona abu-abu', yang menggambarkan aktivitas-aktivitas permusuhan dan agresif yang berada 'di atas dan di bawah' ambang batas yang dianggap sebagai perang (Belo 2025).

Karakter peperangan jarak jauh yang umumnya tidak jelas membuat sulit untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penggunaannya di seluruh dunia. Namun, keberadaannya dapat dilihat di banyak benua. Hal ini dapat dilihat dalam kampanye kontraterorisme di Timur Tengah, Tanduk Afrika, Sahel, dan Asia Tenggara. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi ancaman yang setara, dengan banyak negara mengembangkan strategi 'keterlibatan terus-menerus' yang melibatkan sejumlah kecil pasukan di seluruh dunia yang bekerja sama dengan mitra lokal untuk membangun pengaruh dan pengetahuan lokal guna memperoleh keunggulan atas musuh mereka (Watson 2018).

Perang jarak jauh telah menjadi ciri khas gaya keterlibatan militer Barat pada kuartal pertama abad ini. AS tentu saja telah memimpin dalam hal ini, dan banyak negara Barat lainnya telah mengikutinya. Misalnya, dalam Strategi dan Tinjauan Pertahanan dan Keamanan Strategis (SDSR) 2015, Pemerintah Inggris berjanji untuk menggandakan investasi dalam Pasukan Khusus Inggris dan menggandakan ukuran armada pesawat nirawak bersenjata. Inggris juga telah mengembangkan pendekatan baru untuk menanggapi negara-negara yang terkena dampak konflik, yang mencakup peningkatan fokus pada reformasi sektor keamanan. Aktivitas ini sekarang merupakan sepertiga dari pengeluaran Dana Konflik, Stabilitas, dan Keamanan (CSSF) ((DFID 2018).

Di tempat lain di Eropa, Prancis, Jerman, Italia, dan bahkan beberapa negara Eropa yang lebih kecil seperti Belanda, Belgia, dan Denmark telah beralih ke perang jarak jauh. Misalnya, beberapa negara ini telah melatih pasukan lokal di beberapa bagian Afrika dan Timur Tengah dan melakukan serangan udara sebagai bagian dari Koalisi anti-ISIS (McInnis 2016). Di luar Eropa, Australia menyediakan pengisian bahan bakar udara untuk Koalisi, berbagi intelijen dan membantu melatih dan mempersenjatai pasukan lokal dalam perang melawan ISIS.

Namun, tren keterlibatan militer jarak jauh ini tidak terbatas pada 'Barat.' Rusia menggunakan serangkaian pendekatan jarak jauh, termasuk pasukan operasi khusus, penasihat militer, militer swasta, pembagian intelijen, dan milisi lokal untuk mencaplok Krimea dan sebagian Ukraina timur pada tahun 2014 (Galeotti 2016). Di Suriah, Rusia telah menggunakan campuran metode jarak jauh untuk menstabilkan rezim Assad. Rusia juga memiliki jejak yang kecil di Libya, Venezuela, Mozambik, dan Republik Afrika Tengah (D'Anieri 2025). Di tempat lain, Iran telah beberapa lama bekerja sama dengan pasukan lokal untuk mengejar tujuan nasional di Timur Tengah melalui Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (Krieg 2016). Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Yordania, Turki, dan Uni Emirat Arab semuanya telah menggunakan proksi lokal untuk melawan ancaman regional (Serman 2019). Beberapa negara Afrika memiliki sejarah panjang dalam menggunakan milisi regional untuk melawan kelompok bersenjata non-negara (Craig 2012) dan baru-baru ini mereka menggunakan jasa PMSC untuk melakukannya (Varin 2025). Oleh karena itu, di seluruh dunia, ada tren yang jelas dari negara-negara yang terlibat secara militer dari jarak jauh.

Meskipun ada nuansa di antara berbagai catatan, beberapa penulis telah menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan jenis keterlibatan militer ini. Beberapa ungkapan ini meliputi 'perang pengganti', (Krieg 2016) 'perang transfer risiko', (Shaw 2005), 'perang perwakilan' (Katzman and Thomas 2017), 'perang cair', (Gould 2018), 'perang jaringan' (Duffield 2002), perang proksi koalisi', 'perang pascamodern' dan 'perang bayangan transnasional'. Demmers dan Gould (2018) telah menggambarkan istilah-istilah ini sebagai upaya untuk menangkap "kebaruan baru" dari perang intervensionis'. Namun, ada pertanyaan tentang apakah pendekatan ini berarti peperangan 'telah memasuki era baru, yang secara signifikan berbeda dari apa yang telah kita ketahui di masa lalu'. Analisis tentang peperangan jarak jauh, atau

ekspresi lain dari fenomena yang disebutkan di atas, sering kali dibingkai dengan mengacu pada perdebatan tentang ‘perubahan karakter peperangan’. Wacana yang telah berlangsung lama ini dan usaha penelitian terkait telah mencoba untuk ‘mengidentifikasi apakah perang sedang berubah, dan – jika ya – bagaimana perubahan tersebut memengaruhi hubungan internasional’.

Karakter perang tidak boleh disamakan dengan hakikat perang. Karakter peperangan dipahami, secara sederhana, sebagai cara-cara di mana peperangan dilakukan. Hakikat perang, di sisi lain, mengacu pada hakikat perang yang abadi – atau apa adanya. Ada beberapa konsensus dengan para peneliti dan sejarawan konflik bahwa hakikat perang tidak berubah. Jika kita memahami peperangan sebagai pertikaian keinginan yang keras antara para pihak (Clausewitz 1940/1832)), maka hal ini terlihat masih berlaku dalam bentuk-bentuk keterlibatan jarak jauh. Meskipun demikian, munculnya teknologi-teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, memang merupakan tantangan yang signifikan terhadap unsur manusia dalam peperangan. Christopher Coker (Coker 2013) bahkan berspekulasi bahwa di masa depan kita mungkin menyaksikan ‘perang pascamanusia’ di mana mesin telah menggantikan manusia di medan perang.

Ada argumen kuat yang dapat dikemukakan bahwa karakter, bukan hakikat, peperanganlah yang telah berubah melalui penggunaan peperangan jarak jauh. Dari sudut pandang tertentu, peperangan jarak jauh menantang pemahaman tradisional tentang medan perang dan prajurit. Negara-negara yang ‘melakukan intervensi’ kini berada jauh dari garis depan, menyediakan pelatihan di pangkalan-pangkalan yang dibentengi atau dukungan dari udara melalui teknologi. Memang, lompatan teknologi yang terlihat dalam revolusi terkini dalam urusan militer telah menyediakan sarana bagi negara-negara untuk melancarkan peperangan dari jarak jauh. Ada argumen yang menyatakan bahwa penggunaan peperangan jarak jauh telah menyebabkan ‘konfigurasi ulang perang secara temporal dan spasial’. Dari perspektif ini, garis-garis antara perang dan perdamaian terlihat telah menjadi kabur, karena kini sering kali hanya ada sedikit deklarasi perang yang jelas, dan batas-batas geografis serta kerangka hukum yang mendefinisikan konflik menjadi sulit untuk dibedakan (Belo 2025). Para pakar telah mencatat bahwa kita kini melihat lingkungan dalam ‘kondisi rapuh’ yang mana terdapat kondisi konflik yang terus-menerus, yang terkadang disebut ‘perang abadi’, (Chesterman 2011), dan perubahan mosaik aktor yang terlibat dengan tujuan yang saling bertentangan.

Meskipun lingkungan konflik mungkin berubah dan teknologi militer berkembang, terlihat bahwa banyak aspek peperangan jarak jauh tidak selalu baru. Pelatihan dan persenjataan pasukan lokal oleh kekuatan eksternal, misalnya, telah digunakan sejak jaman dahulu. Selama Perang Dingin, negara-negara adikuasa secara teratur bersaing satu sama lain dengan menggunakan pasukan yang dilatih dan diperlengkapi secara lokal. Praktik ini berlanjut setelah runtuhnya Tembok Berlin. Penelitian telah menemukan bahwa dari tahun 1945 hingga 2011, aktor eksternal memberikan dukungan eksplisit atau yang diduga kepada 48 persen dari 443 kelompok pemberontak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Di banyak negara, terutama AS, pasukan khusus ‘telah berkembang dalam segala hal – dari anggaran hingga ukuran, kecepatan operasi, hingga cakupan geografis misi mereka. Namun, terlepas dari proliferasi global mereka baru-baru ini, asal usul pasukan khusus, setidaknya secara konseptual, sering dianggap berasal dari penggunaan Desert Rats dalam Perang Dunia Pertama. Mereka secara resmi didirikan sebagai bagian dari militer Inggris dalam Perang Dunia Kedua, dengan *Special Air Service* (SAS).

## **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Rancangan ini memungkinkan peneliti untuk mempertajam metode penelitian yang sesuai dengan pokok bahasan dan menyiapkan penelitian mereka agar berhasil. Pembuatan topik penelitian menjelaskan jenis penelitian (eksperimental, penelitian survei, korelasional, semi-eksperimental, tinjauan) dan sub-jenisnya (desain eksperimental, masalah penelitian, studi kasus deskriptif).

Istilah rancangan penelitian dan metode penelitian acap kali digunakan secara bergantian. Akan tetapi, kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki konsep yang berbeda. Rancangan penelitian mengacu pada struktur logis dari penelitian yang menentukan bagaimana keseluruhan prosesnya akan mampu menjadi solusi yang menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan, metode penelitian merupakan konsep yang spesifik untuk pengumpulan data, seperti pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau dapat juga memadukan kedua metode tersebut secara bergantian (Jalil n.d.)

Klasifikasi rancangan penelitian dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Sebagian pakar mengelompokkannya berdasarkan cara pertanyaan penelitian dirumuskan (seperti eksploratif atau deskriptif), sementara yang lain memusatkan perhatian pada metode pengumpulan data (seperti survei, pendekatan kuantitatif, atau kualitatif). Terdapat pula pengelompokan desain penelitian ke dalam desain eksperimental, eksperimental semu, dan non-eksperimental (Jalil n.d.).

Rancangan penelitian juga dapat dikelompokkan menjadi rancangan tetap dan rancangan fleksibel. Dalam rancangan tetap, perencanaan penelitian ditetapkan sebelum tahap pengumpulan data. Biasanya, rancangan tetap didasarkan pada teori untuk bisa mengetahui variabel yang perlu dikontrol dan diukur. Biasanya, variabel-variabel tersebut diukur secara kuantitatif (Robson 1993). Sebaliknya, rancangan yang fleksibel memungkinkan kebebasan dan adaptasi selama proses pengumpulan data. Salah satu faktor yang menyebabkan rancangan penelitian yang fleksibel, yaitu jika variabelnya tidak dapat diukur seperti pada penelitian budaya atau sosial.

Dalam rancangan penelitian tesis ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur. Antara lain, Ali dan Yusof (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: *Any investigation which does not make use of statistical procedures is called "qualitative" nowadays, as if this were a quality label in itself.* (Azham Md. Ali Juni, 2011). Definisi Ali dan Yusof tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika.

Itu artinya, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

## **PEMBAHASAN**

Bantuan militer, yang salah satu komponennya adalah kerja sama keamanan, telah lama menjadi perangkat kebijakan luar negeri Amerika. Amerika, sebagaimana telah disinggung dalam Bab 1 tesis ini, telah memberikan bantuan militer kepada lebih dari 100 negara setelah tahun 1945. Selama Perang Dingin, sekitar \$390 miliar dihabiskan untuk bantuan militer dan pembangunan.

Bantuan ini memiliki berbagai tujuan strategis. Selain membantu mitra mempertahankan diri dari ekspansi komunis, bantuan ini merupakan jalur utama yang digunakan AS untuk menstabilkan akses ke pasar luar negeri dan membantu mengamankan akses ke pangkalan di luar negeri.

Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Robert McNamara, yang juga telah saya singgung di awal Bab, bantuan militer, telah menghasilkan 'produk sampingan ekonomi yang penting bagi kebijakan luar negeri Amerika sehubungan dengan stabilitas dan kemajuan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang dan sedang berkembang' dan membantu mengamankan 'akses ke pangkalan dan instalasi di luar negeri'. Ketiga dinamika ini tampak jelas di Tanduk Afrika. Sebelum kudeta komunis yang menggulingkan Kaisar Haile Selassie pada tahun 1974, Ethiopia telah menerima bantuan militer senilai \$286 juta setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu, ketika pola dukungan material ditata ulang untuk mencerminkan lanskap politik baru di kawasan itu, aliran bantuan militer dialihkan ke negara tetangga Somalia. Di Somalia, AS setuju untuk 'menyediakan \$40 juta dalam bentuk senjata sebagai imbalan atas penggunaan pangkalan udara dan pelabuhan Somalia'.

Praktik semacam itu terus berlanjut setelah Perang Dingin. Bantuan militer telah menjadi bagian integral dari upaya pasca-9/11 untuk menolak organisasi teroris transnasional tempat berlindung yang aman di negara-negara rapuh. Miliaran dolar dihabiskan oleh AS dan mitra koalisinya untuk melatih, memperlengkapi, dan menasihati puluhan ribu tentara Afghanistan dan Irak sebagai bagian dari kampanye kontrapemberontakan di kedua negara.

Kunci untuk operasi kontraterorisme di Afrika adalah perubahan yang ditetapkan dalam Tinjauan Pertahanan Kuadriliun 2006, sebuah dokumen perencanaan pertahanan yang sangat berpengaruh yang menyaring pendekatan Pentagon yang terus berkembang terhadap peperangan tidak teratur. Dokumen ini menguraikan sejumlah penyesuaian penting terhadap strategi pertahanan AS, termasuk peralihan dari intervensi militer berskala besar ke arah memerangi 'berbagai operasi asimetris dan tidak teratur'.

Komitmen ini tetap menjadi komponen inti dari kebijakan kontraterorisme Obama. Tinjauan Strategis Pertahanan 2012, misalnya, menempatkan pelatihan, perlengkapan, dan konsultasi pasukan keamanan asing di pusat perang yang sedang berlangsung melawan al-Qaeda. 'Seiring dengan penarikan pasukan AS di Afghanistan', dokumen tersebut merinci, 'upaya kontraterorisme global akan didistribusikan lebih luas dan akan dicirikan oleh campuran aksi langsung dan bantuan pasukan keamanan'. Meskipun ada pencabutan beberapa pembatasan era Obama terhadap penggunaan kekuatan, pemerintahan Trump telah mempertahankan kerja sama keamanan sebagai alat kontraterorisme utama. Strategi Nasional Kontraterorisme 2018 menegaskan kembali pentingnya 'meningkatkan kemampuan mitra asing utama untuk melakukan kegiatan kontraterorisme kritis', yang tetap menjadi komponen penting bagi respons militer terhadap organisasi teroris transnasional. Dengan melembagakan proses yang dapat ditelusuri kembali ke 'poros ke Asia' Obama, pemerintahan Trump telah mengkalibrasi ulang arah strategis keseluruhan kebijakan pertahanan AS.

Mengenai bagaimana implementasi kerja sama keamanan ini dilakukan Amerika sebagai perangkat perang jauhnya di kawasan Tanduk Afrika, pada bagian berikut adalah pembahasan dan analisisnya.

### **Kerjasama Keamanan sebagai Perangkat Perang Jarak Jauh AS**

Inti dari perdebatan terkini tentang peperangan jarak jauh adalah tren untuk melawan ancaman keamanan pada jarak fisik, politik, dan strategis yang lebih jauh. Oxford Research Group mendefinisikan peperangan jarak jauh sebagai 'istilah yang menggambarkan pendekatan untuk

pertempuran yang tidak memerlukan pengerahan sejumlah besar pasukan darat Anda sendiri'. (Watson 2018). Meskipun ada sedikit pendekatan 'pilih-dan-campur' terhadap cara pengkatalogan ini, berbagai praktik taktis telah dipelajari di bawah label ini, termasuk kekuatan udara berawak dan tak berawak, bantuan militer, operasi siber, pembagian intelijen, kontraktor keamanan militer swasta, dan pasukan operasi khusus (SOF). Sementara negara-negara Barat dapat melakukan operasi tempur langsung terhadap tantangan keamanan bersama, mereka melakukannya dari udara atau dengan unit SOF elit, bukan pasukan darat konvensional mereka. Sebagian besar pertempuran malah didelegasikan kepada agen keamanan lokal yang kapasitas militernya diperkuat melalui kerja sama keamanan dan paket dukungan operasional yang disesuaikan, yang sering kali terdiri dari penasihat SOF yang tertanam, kekuatan udara, dan pembagian intelijen (Watson 2018). Bila ditempatkan dalam perdebatan ini, kerja sama keamanan menawarkan prospek yang menarik untuk membentuk situasi keamanan di lapangan, khususnya di tempat-tempat seperti Somalia di mana kepentingan keamanan yang penting, tetapi tidak vital, terancam. Kerja sama keamanan dapat membantu membangun kapasitas agen keamanan yang bermitra untuk melakukan operasi militer pada standar atau skala yang melampaui kemampuan sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan keamanan bersama dengan lebih baik. (J. M. Stephen Biddle 2017) Logika keamanan yang intuitif ini memiliki dua dimensi. Di satu sisi, ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas beberapa agen keamanan asing untuk menolak organisasi teroris transnasional dari ruang yang tidak diatur untuk beroperasi (J. M. Stephen Biddle 2017). Di sisi lain, ini menyediakan sarana untuk memungkinkan agen keamanan asing lainnya untuk berpartisipasi dalam operasi koalisi bersama atau menggantikan pasukan Amerika (Ross (2016)) Yang mengikat logika keamanan kerja sama keamanan sebagai alat peperangan jarak jauh adalah bahwa, secara teori jika tidak harus dalam praktik, hal itu dapat 'mengurangi kebutuhan pasukan AS untuk melakukan pertempuran dengan meningkatkan kemampuan sekutu untuk melakukannya sendiri' (Ross (2016))

Di luar ini, kerja sama keamanan juga memiliki logika strategis. Andrew Shapiro, mantan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik-Militer, mencatat bagaimana kerja sama pada isu pertahanan yang sensitif memperkuat hubungan diplomatik antara AS dan negara penerima, menciptakan pola kerja sama, ketergantungan, dan pengaruh baru (Evans 1994). Sementara kerja sama keamanan tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi pengaruh, hal itu dapat 'membantu mengikat sektor keamanan suatu negara ke Amerika Serikat' dan menciptakan 'insentif yang kuat bagi negara penerima untuk menjaga hubungan dekat, baik di masa stabilitas maupun krisis' (Ross (2016)). Lebih jauh lagi, hal ini dapat membantu mengamankan akses geografis dan politik-teknis, sebuah prinsip yang diakui dalam Publikasi Bersama 3–20 yang mencatat bagaimana aktivitas kerja sama keamanan 'mendukung kampanye militer AS dan rencana kontinjensi dengan akses yang diperlukan, infrastruktur penting, dan dukungan [negara mitra]'.

Akses geografis ini memiliki banyak bentuk dan tidak terbatas pada hak pangkalan di luar negeri. Seperti yang tercantum dalam literatur yang lebih luas, akses ini juga dapat mencakup akses ke wilayah udara untuk melakukan pengintaian udara dan operasi penyerangan; personel militer asing, untuk membangun kapasitas mitra, berpartisipasi dalam serangan gabungan antiterorisme, dan menyediakan intelijen; dan transit, baik untuk melakukan operasi militer di negara tetangga atau untuk memasok kembali pasukan tempur AS di medan perang. (Tankel 2025). Dengan cara ini, logika strategis kerja sama keamanan dapat membantu AS menyediakan akses teritorial ke negara-negara mitra, tetapi juga akses teknis kepada agen keamanan mitra yang, dalam peperangan jarak jauh, melakukan sebagian besar pertempuran garis depan.

Untuk menegaskan kembali, penyediaan bantuan militer tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi pengaruh langsung (Ross (2016)). Seperti yang dipahami melalui sudut pandang teori *principal-agent* (Ross (2016)), dinamika politik merupakan hal yang penting bagi efektivitas upaya membangun mitra. Pertanyaan tentang kemanjuran mengalir dari kerugian agensi substansial yang terlibat dalam penggunaan program-program ini, seperti yang terlihat dalam tantangan yang dihasilkan oleh masalah seleksi yang merugikan, asimetri kepentingan, dan kesulitan dalam memantau bagaimana pelatihan dan peralatan militer digunakan oleh penerima (Ross (2016)). Di lokasi kerja sama keamanan yang diperebutkan seperti Somalia, dapat juga terjadi persaingan di antara penyedia kerja sama keamanan untuk mendapatkan pengaruh, yang semakin memperumit masalah. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang terlibat dalam upaya membangun mitra Inggris di Somalia, 'ketika Anda berada di sana sebagai tim yang terdiri dari 15 orang, Anda tidak memiliki pengaruh otomatis [...] jadi Anda memerlukan waktu untuk membangun hubungan sebagai gantinya. Anda berada di sana bersaing dengan orang internasional lain untuk mendapatkan pengaruh' (Watson 2018).

Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, aktivitas kerja sama keamanan dapat membantu menghasilkan berbagai bentuk akses yang diuraikan di atas. Seperti yang didokumentasikan Knowles dan Watson, dengan investasi yang relatif sederhana dalam tenaga kerja dan sumber daya, Inggris Raya mampu mengamankan akses ke ruang operasi dan intelijen di AMISOM melalui upaya membangun mitra di Somalia: 'tingkat akses yang tinggi - yang dapat mengarah pada kemitraan yang lebih efektif di masa mendatang'. (Watson 2018). Selain dinamika politik yang intrinsik dalam penyampaian kerja sama keamanan yang memengaruhi efektivitas program terkait, konteks politik yang menginformasikan keputusan 'prinsipal' untuk memberikan bantuan kepada 'agen' juga layak dipertimbangkan.

### **Kerjasama Keamanan AS sebagai Perang Jarak Jauh di Tanduk Afrika**

Pelatihan, perlengkapan, dan konsultasi eksternal bagi pasukan keamanan Afrika bukanlah hal baru. Kekuatan-kekuatan Eropa sangat bergantung pada militer yang dibentuk secara lokal untuk menambah pasukan darat mereka sendiri sepanjang era kekaisaran (Rob Johnson 2017). Selama Perang Dingin, pemerintah AS memberikan bantuan militer kepada negara-negara di seluruh Tanduk Afrika (Kuzmarov 2024). Wilayah tersebut merupakan tempat persaingan Timur-Barat yang ketat, dengan kedua negara adikuasa aktif dalam memajukan kepentingan ideologis dan geopolitik masing-masing di seluruh wilayah (Makinda (1982)). Pemberian bantuan militer memiliki logika keamanan dan strategis. Hal itu dimaksudkan untuk membantu menjaga akses ke fasilitas udara dan laut di Ethiopia dan kemudian Somalia; mempertahankan stabilitas internal pemerintah mitra; dan menjaga keterbukaan jalur air Bab-el-Mandeb yang penting secara strategis, jalur utama perdagangan global. (Lewis (1987)). Upaya untuk mengelola tantangan keamanan di Tanduk Afrika dari 'luar cakrawala' ini semakin didorong oleh tewasnya delapan belas anggota Army Rangers selama Pertempuran Mogadishu tahun 1993, yang dikenal sebagai insiden 'Black Hawk Down'. Seperti yang dikemukakan Robert Patman, 'Sindrom Somalia' yang diakibatkannya menimbulkan skeptisisme yang mendalam tentang intervensi di lapangan dalam krisis kemanusiaan, yang kemudian membentuk kampanye perang jarak jauh di Afrik (Lewis (1987)).

Setelah serangan 9/11, pejabat pemerintahan Bush khawatir bahwa pimpinan senior al-Qaeda akan pindah ke Tanduk Afrika setelah mereka diusir dari Afghanistan (Maria Ryan 2019). Bermarkas di Camp Lemonnier di Djibouti, Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA) dibentuk pada Oktober 2002 untuk mengoordinasikan kegiatan kontraterorisme di seluruh wilayah dengan fokus yang kuat pada pengembangan kapasitas mitra dan operasi sipil-militer

(Maria Ryan 2019). Setelah memisahkan diri dari Islamic Courts Union pada tahun 2006 dengan latar belakang invasi Ethiopia yang didukung AS ke Somalia, al-Shabaab muncul sebagai target utama kegiatan CJTF-HOA. Kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda ini telah melakukan pemberontakan yang efektif terhadap Pemerintah Federal Somalia dan Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM), yang terakhir dibentuk pada tahun 2007 untuk mendukung Somalia. Al-Shabaab terkadang menguasai sebagian besar wilayah di Somalia tengah dan selatan, melakukan serangan teroris di negara tetangga Kenya dan Ethiopia, dan menyusup ke badan keamanan dan intelijen Somalia (Serman 2019).

Dimulai pada masa kepresidenan George W. Bush, bertentangan dengan saran dari mitra lokal untuk menjaga 'profil rendah' guna meminimalkan risiko bagi kontingen penjaga perdamaian (Maria Ryan 2019), pemerintahan AS berturut-turut telah memanfaatkan kerja sama Keamanan bersamaan dengan praktik intervensi jarak jauh lainnya (Stewart 2025). Pada tahun 2007, Komando Operasi Khusus Gabungan (JSOC) DOD diberi wewenang untuk melakukan serangan udara dari pesawat berawak/tanpa awak dan melakukan serangan SOF 'membunuh/menangkap' terhadap kepemimpinan senior al-Shabaab. Pada Januari 2017, antara 32–36 serangan rahasia dilaporkan telah dilakukan, dengan serangan pesawat tak berawak pertama dilaporkan terjadi pada Juni 2011 (The Bureau of Investigative Journalism 2017). Meskipun mengganggu, serangan semacam itu merupakan bagian kecil dari paket intervensi yang lebih besar: 'Strategi Amerika untuk menahan dan akhirnya mengalahkan al Shabaab bergantung pada AMISOM dan Tentara Nasional Somalia' (The Bureau of Investigative Journalism 2017). Hal ini menggambarkan pentingnya kerja sama keamanan dalam kampanye perang jarak jauh ini.

Menurut data yang diberikan oleh Security Assistance Monitor (2019), Somalia dialokasikan setidaknya \$248,6 juta dalam bantuan militer pada periode antara tahun fiskal 2006–2018 (The Bureau of Investigative Journalism 2017). Dalam kabel diplomatik tahun 2009 yang dikirim dari kedutaan besar Amerika di Ethiopia, muncul kekhawatiran tentang pemberian dukungan militer kepada Pemerintah Federal Transisi Somalia yang masih muda tanpa memperkuat kapasitasnya untuk memerintah dan menyediakan layanan publik karena tindakan tersebut 'meningkatkan keterlibatan AS dalam rawa perang saudara Somalia atas nama kontraterorisme' (The Bureau of Investigative Journalism 2017). Dengan semangat ini, baru pada tahun 2013 pemerintahan Obama mencabut pembatasan penyediaan peralatan dan layanan pertahanan bagi tentara Somalia, (Ross (2016)) sementara upaya untuk membangun kapasitas Tentara Nasional Somalia (SNA) semakin mendapatkan momentum menyusul pengumuman Rencana Guulwade (Kemenangan) pada bulan April 2015 yang bertujuan untuk menciptakan pasukan keamanan berkekuatan 10.900 orang yang mampu memfasilitasi penarikan pasukan AMISOM dari Somalia (Reno 2018).

Meskipun ada berbagai upaya ini, SNA tetap kekurangan personel, kurang dipimpin, dan kurang diperlengkapi (Matissek 2018). Menurut penilaian Paul Williams, SNA adalah 'pasukan yang hanya sekadar nama, sebagian besar terbatas pada operasi defensif dan lokal, tidak mampu melaksanakan kampanye nasional yang koheren, dan sering bergantung pada [pihak lain] untuk perlindungan, mengamankan rute pasokan utama, dukungan logistik, dan evakuasi korban' (Matissek 2018). Kompi infanteri canggih Lightning 'Danab', salah satu dari sedikit keberhasilan komparatif kegiatan membangun mitra AS misalnya, umumnya beroperasi secara terpisah dari SNA (Reno 2018). dan dilaporkan terisolasi dari pengaruh beberapa pejabat pemerintah Somalia (Reno 2018) Mencerminkan hal ini dan berbagai tantangan politik, kontekstual, dan operasional lainnya, fokus upaya kerja sama keamanan Amerika di Tanduk Afrika terpusat pada AMISOM.

Enam negara penyumbang AMISOM yang tercantum dalam Gambar 1 menerima bantuan militer sebesar \$1,28 miliar antara tahun anggaran 2006-2018 (Security Assistance Monitor 2018).

**Tabel 4. 1 Negara-negara penyumbang pasukan AMISOM**

<b>Negara</b>	<b>Tahun bergabung dengan AMISOM</b>	<b>Jumlah kontribusi pasukan AMISOM</b>
Burundi	2007	5,400
Djibouti	2011	1,800
Ethiopia	2014	4,400
Kenya	2012	4,300
Sierra Leone	2013	850
Uganda	2007	6,200

**Sumber : Security Assistance Monitor (2018)**

Bantuan ini diberikan baik secara langsung kepada negara-negara kontributor AMISOM maupun secara tidak langsung melalui Kantor Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia (Ross (2016)). Contoh bentuk bantuan pertama termasuk penggunaan program berorientasi kontraterorisme Bagian 1206/Bagian 3333 (\$730,5 juta) dan Dana Kemitraan Kontraterorisme (\$59 juta) (Ross (2016)). Sebagai sebuah kawasan, Afrika Timur juga dialokasikan \$275,9 juta dalam bantuan Dana Kemitraan Kontraterorisme antara tahun anggaran 2015-2016 dan \$112,2 juta dalam dana Otoritas Transisi Bagian 1207(n) antara tahun anggaran 2012-2014 (Pemantau Bantuan Keamanan 2019) (Serafino n.d.) Di luar ini, AMISOM juga dialokasikan setidaknya \$2 miliar dalam pendanaan melalui rekening Operasi Pemeliharaan Perdamaian Departemen Luar Negeri. Menurut lembar fakta Gedung Putih tahun 2014, \$512 juta juga telah dikomitmenkan untuk mendukung AMISOM melalui ‘pelatihan pra-penempatan, penyediaan peralatan militer, dan penasihat di lapangan’ (The White House 2013)

**Tabel Bantuan militer AS kepada negara-negara penyumbang AMISOM tahun anggaran 2006-2018 dalam jutaan \$.**

<b>Negara</b>	<b>Total Bantuan Militer AS</b>	<b>Section 1206/Section 3333</b>	<b>Dana Kemitraan Kontraterorisme</b>
Burundi	\$53.2	\$34.7	–
Djibouti	\$77.4	\$37.8	–
Ethiopia	\$121.5	\$67.4	\$18.7
Kenya	\$628.3	\$354.4	\$31.4
Sierra Leone	\$27.9	\$0.1	–
Uganda	\$373.8	\$236.1	\$8.9
Total	\$1,282.1	\$730.5	\$59

**Sumber : The White House (2014)**

Konsisten dengan penggunaan kerja sama keamanan untuk memungkinkan mitra berpartisipasi dalam operasi koalisi, dana ini dialokasikan untuk menutup kesenjangan utama dalam kapasitas kontraterorisme penerimanya. Dana Bagian 1207(n), misalnya, dimaksudkan untuk membangun kapasitas 'Djibouti, Ethiopia, dan Kenya untuk melakukan operasi kontraterorisme terhadap al-Qaeda, afiliasi al-Qaeda, dan al Shabaab'. (Serafino n.d.) Demikian pula, dana CTFP diminta untuk meningkatkan intelijen, pengawasan dan pengintaian, interdiksi kontraterorisme, kontra-alat peledak rakitan dan kemampuan komando dan kontrol kontributor

AMISOM. (Office of the Under Secretary of Defense 2017). Fokus yang sempit seperti itu pada 'memasukkan' kompetensi taktis yang lebih besar tanpa membangun arsitektur kelembagaan dan logistik untuk mendukungnya telah menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan keuntungan ini setelah keran pendanaan dimatikan.

Sebagaimana dicatat dalam literatur yang lebih luas, efektivitas kegiatan kerja sama keamanan masih diperdebatkan (J. M. Stephen Biddle 2017). Di Somalia, terdapat penekanan berlebihan pada pembangunan kemampuan taktis pasukan keamanan lokal dengan mengorbankan reformasi politik dan kelembagaan yang diperlukan untuk penyelesaian konflik jangka panjang (J. M. Stephen Biddle 2017), serta kurangnya perhatian pada strategi yang lebih luas. Kegagalan pelaksanaan ini diperparah oleh keterbatasan struktural dari apa yang mungkin dicapai kerja sama keamanan dalam kondisi negara runtuh. Hal ini diakibatkan oleh ketidakselarasan kepentingan antara AS dan berbagai aktor lokal. Mitra lokal mempertahankan agensi mereka sendiri, dan dalam kasus Somalia, tidak memiliki kemauan politik atau insentif untuk menyelaraskan kembali perilaku mereka sesuai dengan preferensi keamanan Amerika. Menurut seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya, 'melenyapkan al-Shabaab adalah bagian yang mudah; bagian yang sulit adalah membuat lembaga-lembaga Somalia bekerja' (Matissek 2018). Hambatan-hambatan ini konsisten dengan masalah *principal-agent* yang menjadi ciri penggunaan alat kebijakan khusus ini. Jarak yang sangat jauh antara donor-sebagai-principal dan penerima-sebagai-agent yang memungkinkan kerja sama keamanan berfungsi sebagai sarana peperangan jarak jauh juga melemahkan kemanjurannya sebagai alat keamanan (J. M. Stephen Biddle 2017)

Terlepas dari hambatan-hambatan ini terhadap konversi dukungan militer menjadi hasil politik yang diinginkan, fokus yang lebih luas pada logika strategis kerja sama keamanan membuka kalkulus alternatif untuk mengkualifikasi kegagalan-kegagalan yang terdokumentasi dengan baik dari kegiatan-kegiatan ini. Konsisten dengan konseptualisasi kita sebelumnya tentang logika keamanan kerja sama keamanan, terlepas dari kerugian lembaga dan penyalahgunaan bantuan, kerja sama keamanan telah memungkinkan para pembuat kebijakan Amerika untuk memberikan setidaknya beberapa pengaruh di lapangan di wilayah tersebut sambil terus menjauhkan pasukan darat AS yang konvensional dari sebagian besar pertempuran garis depan. Pelatihan dan peralatan yang disediakan melalui kewenangan Bagian 1206 meningkatkan kapasitas negara-negara garis depan seperti Ethiopia dan Kenya untuk mengawasi perbatasan dan wilayah pesisir mereka dengan lebih baik sebelum bergabung dengan AMISOM, membantu membatasi kebebasan bergerak al-Shabaab. Kerja sama keamanan juga memberi insentif dan memfasilitasi kontribusi pasukan AMISOM untuk bertempur di Somalia sendiri. Menyumbangkan pasukan ke AMISOM memungkinkan Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda untuk mengakses pendanaan, pelatihan, dan bantuan yang berorientasi pada pemeliharaan perdamaian dan kontraterorisme AS.

Demikian pula, sebagai prasyarat untuk berpartisipasi, Pemerintah Burundi 'menyusun daftar permintaan setebal 20 halaman yang dianggap perlu untuk bergabung dengan AMISOM, termasuk truk dan bulldoser, pesawat terbang, dan helikopter serta perlengkapan kantor, kantong tidur, peralatan pribadi, dan peralatan optik seperti kacamata penglihatan malam' (Security Assistance Monitor 2018). Sementara pertimbangan politik, kelembagaan, dan normatif lainnya memengaruhi keputusan enam negara kontributor AMISOM untuk menyediakan pasukan guna bertempur di Somalia, peningkatan penerimaan bantuan militer AS di samping sumber dukungan finansial lainnya sering kali, tetapi tidak selalu, menjadi faktor pendorong (Security Assistance Monitor 2018).

Selain itu, diskusi dalam kabel kedutaan yang bocor dan siaran pers publik menggambarkan cara-cara di mana inisiatif kerja sama keamanan mempererat kemitraan politik dengan negara-negara regional utama. Pada tahun 2007, duta besar AS untuk Kenya membahas 'upaya sinkronisasi' di seluruh Tanduk Afrika, melalui 'pendekatan multi-cabang yang melibatkan tindakan militer dan keamanan yang berkelanjutan' dengan upaya diplomatik dan pembangunan lainnya. Dia juga 'menekankan perlunya pejabat dan kontraktor Amerika untuk mengunjungi Somalia', karena 'kunjungan tersebut penting baik untuk operasi maupun untuk mempublikasikan secara efektif baik di Somalia maupun di wilayah tersebut tentang pekerjaan baik' yang sedang dilakukan AS. Di Ethiopia, penyediaan perawatan pesawat dikatakan 'penting untuk melanjutkan hubungan (militer-militer) yang layak dengan mitra yang terbukti dalam perang melawan terorisme'. Staf diplomatik yang bermarkas di Addis Ababa menyatakan kekhawatiran bahwa, karena kegagalan berulang untuk memperbaiki dua pesawat angkut militer C-130 yang dioperasikan Ethiopia dan penutupan Sekolah Staf dan Komando Pertahanan Ethiopia yang didanai AS, beberapa orang dalam militer Ethiopia bermaksud 'menjadikan Tiongkok, dan pada tingkat yang lebih rendah Israel, sebagai hubungan militer utama mereka'. Aktivitas kerja sama keamanan juga memperkuat kerja sama antara mitra regional, termasuk di bidang sensitif seperti intelijen (Chesterman 2011) dan memberi AS akses teknis ke agen keamanan mitra.

Pada tahun 2016, setelah selesainya acara tahunan pertama kerja sama militer-ke-militer, African Partnership Flight, seorang juru bicara Angkatan Udara AS menjelaskan bahwa mempertemukan peserta dari angkatan udara Kenya dan Uganda di bawah instruksi AS akan 'membangun hubungan yang langgeng dengan negara-negara mitra (AS)'. Berbicara tentang efek limpahan kolaboratif dari kerja sama keamanan, juru bicara tersebut lebih lanjut mencatat bahwa melalui kegiatan tersebut AS telah '[membangun] kemitraan dan persahabatan yang telah membantu membuka pintu untuk keterlibatan lebih lanjut, berbagi pengetahuan, dan interoperabilitas antara pasukan kita' (Makinda (1982)) Logika serupa menekankan Latihan Justified Accord tahunan Angkatan Darat AS, yang dimulai pada tahun 2017, yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pasukan regional untuk mendukung AMISOM dan mengembangkan hubungan intra-personal dengan, dan akses, ke pasukan lokal. Seperti yang dikatakan Lapthe C. Flora, wakil Angkatan Darat AS Afrika saat itu, pada tahun 2019: "Saya tidak dapat terlalu menekankan pentingnya latihan seperti Justified Accord [...] Latihan ini tidak hanya berkontribusi pada kesiapan negara-negara Afrika dan operasi penjagaan perdamaian, tetapi juga memberikan kesempatan berharga untuk bekerja sama dan menciptakan hubungan dan persahabatan professional" (Makinda (1982)).

Akhirnya, meskipun sulit untuk mendokumentasikan 'jalur transmisi' yang tepat antara peningkatan kerja sama keamanan dan produksi akses, peningkatan aktivitas kerja sama keamanan untuk memerangi al-Shabaab telah sejajar dengan peluncuran instalasi militer di seluruh Tanduk Afrika. Secara resmi, AS hanya mengoperasikan satu pangkalan militer di Afrika, Camp Lemonnier di Djibouti (Watts 2017). Namun, di sekitar ini, konstelasi 'lokasi keamanan kooperatif' yang lebih kecil yang berorientasi pada kumpulan pesawat nirawak, SOF, dan kontraktor telah dioperasikan, dengan lokasi yang diduga di Ethiopia, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan Selatan, dan Uganda (Makinda (1982)). Dalam kasus Seychelles, ada bukti yang menunjukkan bahwa bantuan militer digunakan untuk mempererat kemitraan bilateral AS dengan pemerintah tuan rumah setelah pangkalan armada kecil MQ-9 Reaper tak bersenjata di pulau itu untuk melakukan misi antipembajakan dan pengawasan.

Selama pertemuan dengan komandan AFRICOM Jenderal William Ward pada bulan Agustus 2009, Presiden Seychelles Michel mencatat bahwa pulaunya adalah 'kapal induk di tengah

Samudra Hindia tanpa pesawat' dan menyambut 'bangkitnya kembali aktivitas militer Amerika di Seychelles' (Stewart 2025). Setelah penggunaan awal fasilitas ini pada bulan September 2009, tingkat keseluruhan bantuan militer AS meningkat dari \$251.299 pada tahun fiskal 2010 (periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2009) menjadi \$893.244 pada tahun fiskal 2011 (Security Assistance Monitor 2018). Sesuai dengan komitmen Jenderal Ward untuk memperkuat hubungan militer bilateral dan meningkatkan kapasitas penjaga pantai pulau-pulau tersebut (Reno 2018) \$535.000 dialokasikan melalui program Pembiayaan Militer Asing Departemen Luar Negeri untuk kapal patroli Metal Shark dan 'Peralatan Secure Video and Data Link'. (Security Assistance Monitor 2018). Menyusul dugaan penanggulangan operasi pesawat nirawak dari pangkalan ini pada suatu saat di tahun 2012 (Security Assistance Monitor 2018). bantuan militer keseluruhan untuk Seychelles menurun dari \$627.580 pada tahun anggaran 2012 menjadi \$464.555 pada tahun anggaran 2013 dan \$268.224 pada tahun anggaran 2014 (Security Assistance Monitor 2018).

## **KESIMPULAN**

Kerja sama keamanan menawarkan kepada pemerintahan Bush, Obama, dan Trump cara yang menarik untuk 'menyelesaikan masalah' penggunaan kekuatan militer. Sebagai alat peperangan jarak jauh, hal ini memungkinkan para perencana untuk memberikan pengaruh terbatas 'di lapangan' dalam lingkungan keamanan luar negeri yang kompleks, tetapi tanpa mengerahkan sejumlah besar 'pasukan darat' mereka sendiri untuk melakukan pertempuran garis depan. Logika keamanan yang dikedepankan dalam banyak studi tentang kegiatan ini merupakan komponen intuitif dari fitur intervensionisme militer AS ini.

Namun, seperti yang telah saya kemukakan, hal ini sejalan dengan serangkaian logika strategis paralel. Kerja sama keamanan telah membantu mengamankan berbagai bentuk akses geografis dan teknis-politik, termasuk dalam hal pangkalan, wilayah udara, dan hak transit; mempererat kemitraan politik; dan membantu menciptakan pola kerja sama dan pengaruh.

Dengan mempertimbangkan perdebatan yang muncul tentang efektivitas perang jarak jauh, saya telah menyoroti perlunya memperhitungkan logika keamanan dan strategis ganda dari perangkat kebijakan seperti kerja sama keamanan. Fitur-fitur yang saling bersinggungan dari perang jarak jauh, sebagaimana diungkapkan melalui dimensi kinetik dan non-kinetiknya, dijelaskan dalam sejarah terkini kebijakan AS di Tanduk Afrika. Di Somalia, AS secara konsisten menggunakan kerja sama keamanan bersamaan dengan praktik intervensi jarak jauh lainnya.

Kemampuan AS untuk menghadapi al-Shabaab secara langsung atau tidak langsung bergantung pada kapasitas Washington untuk mengamankan akses dan kemitraan di kawasan tersebut. Pentingnya kerja sama keamanan di negara seperti Somalia perlu dipahami dengan latar belakang kondisi yang memicu peralihan ke arah perang jarak jauh di pihak AS dan agen-agen lainnya. Tanpa alternatif, program kerja sama keamanan telah menyediakan jalur menuju intervensi berkelanjutan, yang 'keterpencilannya' hanya berlaku bagi aktor yang melakukan intervensi, bukan masyarakat lokal yang menganggap kekerasan politik sebagai hal yang penting. Ini bukan untuk mengklaim bahwa intervensi AS di Tanduk Afrika telah berhasil atau bahwa kegagalannya dapat diperbaiki dengan menggunakan lebih banyak atau berbagai konfigurasi praktik perang jarak jauh. Melainkan, tujuannya adalah untuk menyarankan bahwa dinamika peperangan jarak jauh perlu dianalisis secara holistik, dan terkait dengan tujuan keamanan dan strategis yang dilayaninya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- (DFID, Department for International Development. 2018. *Conflict, Stability and Security Fund. Annual Report 2018/19*, Her Majesty's Government,.
- Ashton B. Carter, William J. Perry, & John D. Steinbruner. 1993. *A New Concept of Cooperative Security*. Washington DC: The Brookings Institution Press.
- Azham Md. Ali, Hamidah Yusof. Juni, 2011. "Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability." *Issues in Social and Environmental Accounting, Vol. 5, No. 1* . 25-26.
- Belo, David Carment & Dani. 2025. "War's Future: The Risks and Rewards of Grey Zone Conflict and Hybrid Warfare, ." *Canadian Global Affairs Institute*.
- Chesterman, Simon. 2011. "Leading from Behind": The Responsibility to Protect, the Obama Doctrine, and Humanitarian Intervention after Libya." *Ethics and international affairs vol 25* 279-285.
- Clausewitz, Carl Von. 1940/1832). *On War*. London: Keagan Paul, French, Truebner.
- Coker, Christopher. 2013. *Warrior Geeks: How 21st Century Technology is Changing the Way We Fight and Think About War*. Hurst Publishing.
- Craig, Dylan. 2012. *roxy war by African States, 1950–2010*. American University.
- Doug Stokes & Kit Waterman, Maria Ryan. 2020. "Enormous Opportunities" and "Hot Frontiers": Sub-Saharan Africa in US Grand Strategy." *The International History Review* 155–175.
- Duffield, Mark. 2002. "Social Reconstruction and the Radicalization of Development: Aid as a Relation of Global Liberal Governance." *Development and Change, Vol. 33, No. 5* 1049–1071.
- Evans, Gareth. 1994. *Cooperative Security and Intra–State Conflict*. Foreign Policy, No. 96 .
- Gabriel Kolko, *Confronting the third world: United States foreign policy, 1945–1980*. 1988. *Confronting the third world: United States foreign policy, 1945–1980*. New York: New York: Pantheon.
- Galeotti, Mark. 2016. "Hybrid, Ambiguous, and Non-Linear? How New is Russia's "New Way of War?" *Small Wars and Insurgencies, Vol. 27, No. 2* 282–301.
- Gould, Jolle Demmers & Lauren. 2018. "An Assemblage Approach to Liquid Warfare: AFRICOM and the "Hunt" for Joseph Kony." *Security Dialogue, Vol. 49, No. 5* 364–381.
- Group, Oxford Research. 2016. *Airwars, Limited Accountability: A transparency audit of the anti-ISIL Coalition*. Oxford Research Group.
- Gusterson, Hugh. 2016. *Drone: Remote Control Warfare*. Massachusetts; London: England: The MIT Press.
- Kant, Immanuel. 1996. *Classics of Modern Political Theory: Machiavelli to Mill*. London: Oxford University Press.
- Katzman, Kenneth, and Clayton Thomas. 2017. *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and US Policy*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Krieg, Andreas. 2016. "'Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US Foreign Policy in the Middle East'." *International Affairs, Vol. 92, No. 1* 109.

- Lewis, William. (1987). "US Military Assistance to Africa." *CSIS Africa Notes*, No. 75 3.
- Makinda, Samuel M. (1982). "'Conflict and the Superpowers in the Horn of Africa'." *Third World Quarterly*, Vol. 4, No. 1 98–101.
- Margesson, Rhoda. 2010. *United Nations Assistance Mission in Afghanistan : Background and Policy Issue*. Washington DC: CSR Report for Congress.
- Maria Ryan. 2019. *Full Spectrum Dominance: Irregular Warfare and the War on Terror*. Stanford: Stanford University Press.
- Matisek, Jahara. 2018. "The crisis of American military assistance: strategic dithering and Fabergé Egg Armies." *Defense and Security Analysis*, Vol. 34, No. 3 278-279.
- McInnis, Kathleen J. 2016. *Coalition contributions to countering the Islamic State*. Congressional Research Service, the Library of Congress.
- Mueller, Karl P. 2015. *Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil War*. RAND Corporation.
- Reno, William. 2018. "The politics of security assistance in the horn of Africa." *Defence Studies*, Vol. 18, No. 4 498–513.
- Rob Johnson. 2017. *True to Their Salt: Indigenous Personnel in Western Armed Forces*. Oxford: Oxford University Press.
- Robson, Collin. 1993. *Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers*. Hoboken, New Jersey, United States: Blackwell Publishing.
- Ross, Tommy. (2016). " "Leveraging Security cooperation as Military Strategy"." *The Washington Quarterly*, Vol. 39, No. 3 96-97.
- Ryan, Maria. 2019. *Full Spectrum Dominance: Irregular Warfare and the War on Terror*. Stanford: Stanford University Press.
- Secretariat Cairo. 1995. "United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders."
- Shaw, Martin. 2005. "The New Western Way of War: Risk-Transfer War and its Crisis in Iraq." *Cambridge: Polity 1*.
- Stephen Biddle, Julia Macdonald, & Ryan Baker. 2017. "Small Footprint, Small Payoff: The Military Effectiveness of Security Force Assistance." *Journal of Strategic Studies* Vol. 41, N.
- Stephen Biddle, Julia Macdonald, Ryan Baker. 2017. "Small Footprint, Small Payoff: The Military Effectiveness of Security Force Assistance." *Journal of Strategic Studies* 89–142.
- Sterman, David. 2019. *Twenty-First Century Proxy Warfare: Confronting Strategic Innovation in a Multipolar World*. New America Foundation.
- Tanner, Stephen. 2002. *Afghanistan : A Military History From Alexander the Great ti the fall of the Taliban* . Cambridge: Da Capo Press.
- Varin, Caroline. 2025. "Turning the Tides of War: The Impact of Private Military and Security Companies on Nigeria's ."
- Watson, Emily Knowles & Abigail. 2018. *Remote Warfare: Lessons Learned from Contemporary Theatres*. Oxford Research Group, Oxford: Remote Warfare Programme.

Watts, Rubrick Biegon & Tom. 2017. "When ends Trump Means: Continuity Versus Change in US Counterterrorism Policy." *Global Affairs* 37–53.

White, Taylor. 2014. "Security cooperation: How It All Fits." *Joint Forces Quarterly*, Vol. 72 ( 106–108).

## Internet

The Bureau of Investigative Journalism. 2017. "Somalia: Reported US covert actions 2001-2016". Accessed 2024. , <https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/somalia-reported-us-covert-actions-2001-2017>.

The White House. 2013. "Fact Sheet: US Security Sector Assistance Policy". Accessed 2025. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/04/05/fact-sheet-us-security-sector-assistance-policy>.

Stewart, Phil. 2025. "US Discloses Secret Somalia Military Presence, up to 120 Troops". Accessed 2025. <https://www.reuters.com/article/us-usa-somalia/exclusive-u-s-discloses-secret-somalia-military-presence-up-to-120-troops-idUSKBN0F72A820140703/>.

Tankel, Stephen. 2025. "Introduction: The Future of Security Assistance". Accessed 2025. <https://tnsr.org/roundtable/policy-roundtable-the-pros-and-cons-of-security-assistance>.

Sinaga, Yuni Arisandy. 2019. *Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian di Afghanistan*. Maret 15. Accessed Januari 30, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/810347/indonesia-siap-berkontribusi-proses-perdamaian-diafghanistan#>.

Staff, Chiefs of. 2017. *Joint Publication 3-20: Security Cooperation*. Accessed 2024. [https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3\\_20.pdf](https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_20.pdf).

Staff, Joint Chiefs of. 2017. *Joint Publication 3-20: Security Cooperation*. Accessed 2024. [https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3\\_20.pdf](https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_20.pdf).

Security Assistance Monitor. 2018. "Data: Programs FY 06-18". Accessed 2025. <http://securityassistance.org/data/program>.

Serafino, Nina. n.d. "Global Security Contingency Fund: Summary and Issue Overview",. Accessed 2025. <https://fas.org/sgp/crs/row/R42641.pdf>.

Oberdorfer, Don. 2025. *US Offers Military Aid to Somalia*. Accessed 2025. <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/07/26/us-offers-military-aid-to-somalia/43249aa8-57e5-45d3-a55c-c4eec934da9a/>.

Office of the Under Secretary of Defense. 2017. *Counterterrorism Partnerships Fund: Department of Defense Budget Fiscal Year (FY) 2017*. Accessed 2024. [http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2017/FY2017\\_CTPF\\_J-Book.pdf](http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2017/FY2017_CTPF_J-Book.pdf).

Kuzmarov, Jeremy. 2024. "American Military Assistance Programs Since 1945." *Oxfordre.com*. Accessed 2025. <https://oxfordre.com/americanhistory/abstract/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-34>.

Kissinger, Jay Ross. 1981. *Confront Soviets in E. Africa Kissinger Advocates More Active Anti-Soviet Role in East Africa*. Accessed 2025.

<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/01/04/kissinger-confront-soviets-in-e-africa-kissinger-advocates-more-active->

- Knowles, Abigail Watson & Emily. 2025. "Improving the UK offer in Africa: Lessons from military partnerships on the continent". Accessed 2025. <https://www.researchgate.net/publication/33381771>.
- Kementrian Sekretaris Negara. 2021. *Indonesia-Afghanistan Sepakat Tingkatkan Kerjasama*. April 6. Accessed Januari 29, 2024. <https://www.setneg.go/>.
- Hartono, Willy. 2021. *Perjanjian AS-Taliban Buka Jalan Perdamaian di Afghanistan*. Maret 1. Accessed Januari 29, 2024. <https://www.medcom.id/internasional/timur-tengah-afrika/yNLGE06K-perjanjian-as-taliban-buka-jalan-perdamaian-di-afghanistan>.
- International Crisis Group. 2020. *Afghanistan Peace Talk Since 2018: A Timeline*. Agustus 11. Accessed Januari 30, 2024. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-between-february-2019-and-august-2020-timeline>.
- irp.fas.org. 2017. "Joint Publication 3-20: Security Cooperation". *irp.fas.org*. Accessed 2025. [https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3\\_20.pdf](https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_20.pdf).
- Jalil, Mohammad Muaz. n.d. *Practical Guidelines for Conducting Research - Summarising Good Research Practice in Line with the DCED Standard*. Accessed 2025. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract\\_id=2591803](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=2591803).
- Gates, Tobert. 2007. *Secretary of Defense Speech. US DOD*. Accessed 2025. <http://archive.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1199>.
- Dupree, Louis, Nancy Hatch Dupree, and Victor Petrov. 2024. *Afghanistan; Ethnolinguistic Composition*. Januari 12. Accessed Januari 27, 2024. <https://www.britannica.com/place/Afghanistan>
- D'Anieri, Taras Kuzio & Paul. 2025. "Sources of Russia's Great Power Politics: Ukraine and the Challenge to the European Order". Accessed 2025. <https://www.e-ir.info/publication/the-sources-of-russias-great-power-politics-ukraine-and-the-challenge-to-the-european-order/> .
- DOD. 2006. *Quadrennial Defense Review Report 2006*. Accessed 2025. <http://archive.defense.gov/pubs/pdfs/QDR20060203.pdf>.
- . 2012. *Sustaining Global Leadership: Priorities For 21st Century Defence*. Accessed 2025. [http://archive.defense.gov/news/Defense\\_Strategic\\_Guidance.pdf](http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf)
- Crisisgroup.org. 2023. *Out of the Box :How to Rebalance U.S. Somalia Policy*. Accessed 2024. <https://www.crisisgroup.org/us-horn-africa-somalia/7-out-box-how-rebalance-us-somalia-policy>
- Abou-Zahr, Sawssan. 2019. *Peace Dispatch: March 2019*. Maret 23. Accessed Januari 27, 2024. <https://www.peaceinsight.org/en/articles/peace-dispatch-march-2019/?location=nigeria&theme=conflict-prevention-early-warning>.